

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A Tauda, Gunawan, 2011, *Kedudukan Komisi Negara Independen Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Pranata Hukum Volume 6.
- Agung Siswanto, Tri dan Irwan Suhandi, 2009, *Jangan Bunuh KPK Perlawanan Terhadap Usaha Pemberantasan Korupsi*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Ali, Zainudin, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan kedelapan, Jakarta: Sinar Grafika.
- Arifin Mochtar, Zainal, 2016, *Lembaga Negara Independen Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amendemen Konstitusi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arifin, Firmansyah dkk, 2005, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN).
- Asshiddiqie, Jimly, 2015, *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_, 2015, *Konstitusi Bernegara Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*, Malang: Setara Press.
- \_\_\_\_\_, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Ditjen dan Kepaniteraan MK RI.
- Crince le roy, 1981, *Kekuasaan ke-empat Pengenal Ulang*, diterjemahkan oleh Soehardjo, Semarang.
- Faisal Sulaiman, King, 2017, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Bandung: Nusa Media.
- Huda, Ni'matul, 2012, *Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

*Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, 2010, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Indrayana, Denny, 2008, *Negara Antara Ada dan Tiada*, Jakarta: Buku Kompas.

Khelda, Ayunita dan Abd. Rais Asman, 2016, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media.

Mahfud, Moh. MD, 2011, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sirajudin dan Winardi, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Malang: Setara Pers.

Wijayanto dan Ridwan Zachrie, 2009, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

## **B. Jurnal**

Ackerman, Bruce, 2000, *The New Separations Of Power*, Harvard Law Review.

Basarah, Ahmad, 2014, *Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary State's Organ Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, DPR RI.

Lavrijssen, Saskia, 2004, *An Analysis of the constitutional position of the US independent Agencies*, TILEC Discussion Paper Tilburg University.

Risang Ayu, Miranda, 2009, *Kedudukan Komisi Independen Sebagai State Auxiliary Institutions Dan Relevansinya Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Konstitusi PSKN FH Unpad.

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017

#### **D. Website**

<https://www.merriam-webster.com/dictionary/corruption>, di akses pada hari Kamis tanggal 13 September 2018

<http://www.kpk.go.id/berita/berita-kpk/229-indeks-persepsi-korupsi-2017-skor-indonesia-di-angka-37> di akses pada hari Rabu tanggal 12 September 2018